

► KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Bappeda Sleman Percepat Pengentasan Kemiskinan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sleman terus melakukan intervensi demi menekan angka kemiskinan di Bumi Sembada.

Intervensi yang dilakukan secara kolaboratif berhasil menurunkan angka kemiskinan dari 7,52% pada 2023 menjadi 7,46% pada 2024.

Kepala Bappeda Sleman, Dwi Anta Sudibya, mengatakan ada tiga hal yang menjadi fokus Pemkab Sleman dalam mengintervensi angka kemiskinan, antara lain jaminan sosial lewat Jaring Pengaman Sosial (JPS), peningkatan ekonomi keluarga miskin, dan pendidikan. Pembagian ini memudahkan program intervensi meski pada dasarnya ketiga hal tersebut satu kesatuan.

Jaminan sosial diberikan untuk warga lansia dan keluarga miskin. Pemberiannya melalui JPS yang bersumber dari APBD 2025 dengan nominal Rp15 miliar. JPS terbagi menjadi tiga bidang, yaitu Kesehatan,

Pendidikan, dan Sosial.

Untuk program peningkatan ekonomi keluarga miskin, Dinas Sosial Sleman membuat kajian pada akhir 2024 yang mencakup pemetaan keluarga miskin hingga potensi wilayah sekitar yang dapat digunakan sebagai pijakan program. Pemetaan menyorot 17 kapanewon di Sleman.

"Pemkab melakukan sampling. Pertanyaan yang kami siapkan mengarah pada hal teknis. Misalnya mayoritas jenis pekerjaan di Tempel apa saja. Seumpama Pemkab menggelar pelatihan, warga berminat ke sektor apa," kata Sudibya saat ditemui di kantornya, Selasa (25/3).

Hasil kajian ini selanjutnya menjadi pijakan Pemkab untuk menggelar program intervensi selama lima tahun ke depan. Program yang dibuat akan lebih jitu.

Untuk sektor pendidikan, Sudibya menerangkan ada program spesifik yang khusus menyorot mahasiswa



Ayu

Dwi Anta Sudibya

ber-KTP Sleman. Program ini masih dirancang dan disempurnakan. "Intinya, dalam satu keluarga miskin harus ada satu anggota keluarga yang mengenyam pendidikan tinggi atau memiliki ijazah strata satu," katanya. Setelah lulus, diharapkan anggota keluarga tersebut mampu mendorong ekonomi keluarga, sehingga

keluarga tersebut dapat mentas dari kemiskinan.

Adapun wilayah yang menjadi lokus kemiskinan, antara lain Kapanewon Minggir, Tempel, dan Prambanan. Tiga kapanewon tersebut sama-sama berada di perbatasan.

Di perdesaan, mayoritas penduduknya memiliki pekerjaan di sektor pertanian. Sektor pertanian sangat bergantung pada produk dan olahan. Apabila produk pertanian melimpah dan diiringi kemudahan pemasaran serta harga yang kompetitif, ekonomi keluarga tani tentu meningkat. (Andreas Yuda

Pramono/*)